

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
KREDIT SEPEDA MOTOR DI BANK PERKREDITAN
RAKYAT SUKADANA SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DIMAR ADHI UTOMO
C 100 130 025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
SEPEDA MOTOR DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA
SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh :

Dimar Adhi Utomo
C 100.130.025

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Nuswardhani, S.H.,S.U)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
SEPEDA MOTOR DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA
SURAKARTA**

Oleh :

DIMAR ADHI UTOMO
C100130025

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 11 Februari 2019

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H, M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

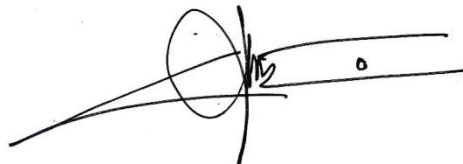
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Februari 2019

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of horizontal strokes.

DIMAR ADHI UTOMO
C 100.130.025

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA SURAKARTA

Abstrak

Banyak produsen sepeda motor menawarkan sepeda motor untuk diperdagangkan, namun dengan harga yang ditawarkan tidak semua orang mampu membeli secara tunai, maka dari itu masyarakat diberikan fasilitas berupa kredit agar dapat memiliki sepeda motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit, bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan yang harus dilakukan antara BPR dan Konsumen dalam dan bagaimana tanggung jawab hukum yang timbul, antara kedua belah pihak di BPR Sukadana Surakarta. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif yaitu meneliti tentang kaedah-kaedah dan asas-asas hukum dan bersifat deskriptif. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder sehingga dapat dikaitkan dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam proses perjanjian kredit pembelian sepeda motor diantaranya dalam perjanjian kredit nasabah harus memenuhi kriteria pengajuan kredit dan sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan, kemudian dilakukan pendaftaran kredit oleh petugas bank, dan mengisi formulir berisi perjanjian standar yang telah ditentukan oleh bank berupa ketentuan-ketentuan yang dibakukan atau disebut perjanjian baku sehingga timbul hak dan kewajiban diantaranya bank berkewajiban memberikan uang pinjaman untuk pembelian sepeda motor sedangkan hak bank sebagai penyedia dana adalah menerima sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen sebagai debitor dan menerima atas jaminan kredit yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Dan Nasabah berkewajiban membayar angsuran tepat waktu dan berhak menerima jaminan hutang yang dibawa bank ketika sudah lunas. Tanggung jawab hukum timbul karena terdapat kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya diantaranya kesalahan karena wanprestasi misal nasabah tidak mampu membayar angsuran berkali-kali dan perbuatan melawan hukum misal nasabah melakukan penggelapan atas barang yang menjadi objek jaminan atau pihak bank melakukan penarikan suku bunga tanpa perberitahuan kepada nasabah terlebih dahulu.

Kata Kunci : Kredit Pembelian Sepeda Motor, Perjanjian Kredit, Tanggung Jawab Hukum

LEGAL RESPONSIBILITIES OF MOTORCYCLE CREDIT AGREEMENT IN BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA SURAKARTA

Abstract

Many motorcycle manufacturers offer motorbikes to offer, but at the price offered not everyone can afford to buy in cash, so the community is given credit facilities so they can provide motorbikes. The purpose of this study is to study the process of implementing credit agreements, how the rights and obligations that must be carried out between BPR and Consumers in and how legal responsibilities arise, between the two parties at BPR Sukadana Surakarta. The research method uses normative research methods, namely discussing the principles and principles of the source of data taken in this study using library research to find secondary data that can be obtained with primary data obtained from field research. The results of the study and discussion in the motorcycle purchase credit approval process submitted in the approval credit must approve the credit application criteria and approval to bind themselves in an agreement, then credit registration is carried out by the bank officer, and fill in the approval application according to the standard agreed by the bank as Provisions - provisions that are standardized or called requirements that arise and the obligations of banks are obliged to provide loan money for the purchase of motorbikes while the right banks provide funds received by consumers as debtors and receive loans approved in accordance with 1131 KUHPperdata. And the Customer is obliged to pay installments on time and has the right to receive. Legal responsibility arises because of mistakes made by one of the parties who are not responsible for defaults, for example spending is unable to pay multiple installments and unlawful actions such as interest without permission.

Keywords: Motorcycle Purchasing Loans, Credit Agreements, Legal Responsibilities

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari bermacam-macam kebutuhan, diantaranya kebutuhan mobilitas sehari-hari menggunakan sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara.¹ Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya yang cukup hemat, maka banyak produsen sepeda motor menawarkan sepeda motor di dealer-dealer untuk diperdagangkan, namun dengan harga yang ditawarkan tidak semua orang mampu membeli secara tunai, maka dari itu agar semua kalangan dapat memiliki sepeda motor diberikan fasilitas berupa kredit agar orang yang tidak mampu membeli secara tunai dapat memiliki sepeda motor.

Dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian. Adanya hubungan jual beli sepeda motor tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian sendiri bisa berupa perjanjian lisan bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis.² Salah satu perjanjian itu adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini terjadi apabila ada pembeli yang ingin membeli suatu barang namun uangnya tidak cukup untuk membayar keseluruhan harga barang yang ingin dibelinya secara kontan, akan tetapi di sisi lain penjual juga berharap barang yang dijualnya laku dan penjual juga dapat menyerahkan barang yang diinginkan pembeli untuk tetap membayar sisa harga barang tersebut dengan cara mengangsur.

Perjanjian kredit ini terjadi apabila ada pembeli yang ingin membeli suatu barang namun uangnya tidak cukup untuk membayar keseluruhan harga barang yang ingin dibelinya secara kontan, akan tetapi di sisi lain penjual juga berharap barang yang dijualnya laku dan penjual juga dapat menyerahkan barang yang diinginkan

¹ Wikipedia, “*Sepeda Motor*”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, pada tanggal 18 Mei 2018, pukul 15.39 WIB.

² M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal. 6.

pembeli untuk tetap membayar sisa harga barang tersebut dengan cara mengangsur.

Dalam melakukan perjanjian kredit pembelian sepeda motor, para pihak didalamnya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.³

Salah satu lembaga pembiayaan yang melayani kredit pembelian sepeda motor adalah Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat membiayai seluruh harga dari sepeda motor yang dibeli konsumen kepada dealer, maka dari itu konsumen tinggal mengangsur sisa angsuran kepada Bank Perkreditan Rakyat sehingga konsumen harus mempunyai perjanjian terhadap Bank Perkreditan Rakyat untuk melakukan perjanjian kredit.

Dengan telah dibuatnya perjanjian tersebut maka nasabah sebagai konsumen harus mematuhi semua isi dalam perjanjian yang telah dibuat oleh Bank Perkreditan Rakyat yaitu setelah nasabah menerima sepeda motor maka nasabah harus mengangsur sisa angsuran kepada Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan nominal dan waktu tempo yang telah disepakati.

Namun pada kenyataannya beberapa konsumen tidak dapat membayar angsuran secara lancar / tidak mampu membayar angsuran secara tepat waktu, sehingga Bank Perkreditan Rakyat melakukan penagihan, ketika Bank Perkreditan Rakyat sudah melakukan penagihan tetapi konsumen tidak juga membayar angsuran maka Bank Perkreditan Rakyat dapat menjatuhkan konsumen berdasarkan Wanprestasi, sehingga konsumen harus bertanggung jawab menurut hukum. Dan ada juga konsumen yang memusnahkan bahkan memindahtangankan benda yang menjadi objek jaminan tersebut sehingga pihak Bank Perkreditan Rakyat dapat menjatuhkan konsumen atas dasar perbuatan melawan hukum.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi : *Pertama* Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di Bank Perkreditan Rakyat Sukadana Surakarta. *Kedua* Bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan yang harus dilakukan antara BPR dan Konsumen dalam perjanjian kredit sepeda motor

³ Sofyan, Sri Soedewi, 1999, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal. 4.

di Bank Perkreditan Rakyat Sukadana Surakarta. *Ketiga* Bagaimana tanggung jawab hukum yang timbul antara kedua belah pihak apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas perjanjian kredit yang dilakukan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perjanjian kredit pembelian sepeda motor, hak dan kewajiban dan peraturan yang berlaku pada para pihak dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit pembelian sepeda motor jika salah satu pihak melakukan kesalahan.

2. METODE

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah Pendekatan Normatif karena dalam peneliti yang peneliti cari adalah aspek-aspek hukum dari tanggung jawab hukum perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perjanjian kredit pembelian sepeda motor dan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena yang akan diteliti adalah penelitian yang secara menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit.⁴ Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan studi lapangan yang menggunakan wawancara dan observasi. Metode analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode dan teknik pengumpulan data dengan cara memakai dan menganalisis data sekunder yang dipadukan dengan data primer yang diperoleh dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemimpin atau staf Bank Perkreditan Rakyat Sukadana Surakarta yang bisa memberi penjelasan tentang masalah yang diteliti.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 12.

⁵ Sugiarto, 2001, *Teknik Sampling*, Jakarta: Gramedia, Hal. 17.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perjanjian Kredit Pembelian Sepeda Motor antara Bank dan Nasabah

Dalam proses perjanjian Kredit Pembelian Sepeda Motor antara pihak bank dengan pihak nasabah melalui beberapa tahapan yaitu :

3.1.1 Proses Sebelum Terjadinya Perjanjian Kredit Pembelian Sepeda Motor

Sebelum melakukan Perjanjian Kredit, nasabah mengajukan permohonan kredit dengan melengkapi syarat administrasi. Setelah semua persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh nasabah dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, kemudian nasabah dengan bank melakukan Perjanjian Kredit yang mana konsumen harus melakukan pembayaran uang muka / *down payment* (DP) terlebih dahulu sesuai kesepakatan yang ditentukan. Dan pemohon membayar biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Kredit seperti biaya administrasi dan biaya provisi dalam Perjanjian Kredit.⁶

3.1.2 Pada Saat Terjadinya Perjanjian Kredit Pembelian Sepeda Motor

Jika persyaratan sudah lengkap, maka akan dilakukan pendaftaran kredit oleh petugas Bank. Selanjutnya permohonan kredit tersebut diserahkan kepada kepala petugas yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh dokumen dalam penyelesaian. Selanjutnya petugas bank mengadakan survey lapangan terhadap usaha nasabah (calon debitur), jaminan, karakter ataupun perilaku nasabah apakah nasabah layak diberikan fasilitas kredit atau tidak. Kemudian petugas menganalisis objek yang dijadikan jaminan kredit termasuk menaksir nilai jaminan.⁷

Setelah melakukan semua analisis menghitung berapa besar kredit yang dibutuhkan nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan calon debitur mengenai jumlah kredit, jangka waktu kredit dan suku bunga. Apabila telah dicapai kesepakatan langkah selanjutnya adalah penandatanganan Surat Penawaran oleh

⁶ Ruri Hidayati, Legal Staff BPR Sukadana Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2018, Pukul 10.00 WIB.

⁷ Ruri Hidayati, Legal Staff BPR Sukadana Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2018, Pukul 10.00 WIB.

nasabah kepada petugas yang kemudian diteruskan kepada pimpinan cabang untuk ditandatangani oleh pimpinan cabang.

BPR Sukadana Surakarta mewajibkan nasabah menerima fasilitas kredit tersebut dengan bukti pembayaran uang muka pembelian sepeda motor dan sepeda motor yang akan dijaminkan berupa kwintansi pembayaran uang muka minimal sebesar 25% dari harga dealer. Kredit yang dicairkan tersebut selanjutnya diberikan kepada pihak ketiga (dealer), dalam hal ini pihak dealer oleh bank berdasarkan surat kuasa untuk membayar dari debitor kepada bank.⁸

3.1.3 Setelah terjadinya kredit pembelian sepeda motor

Setelah nasabah menyetujui persyaratan dan ketentuan baku dari bank mengenai harga kendaraan, uang muka (DP) dan jumlah angsuran yang akan dibayarkan tiap bulannya atas sepeda motor yang akan dibeli. Kemudian mengisi formulir berisi perjanjian standar yang telah ditentukan oleh bank berupa ketentuan-ketentuan yang dibakukan.

Setelah konsumen dan bank menyetujui isi perjanjian Permohonan Kredit maka terjadilah kesepakatan kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebut timbul hubungan hukum antara konsumen dengan bank serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan Perjanjian Kredit.⁹

3.2 Hak dan Kewajiban serta Peraturan yang Harus Dilakukan antara Pihak BPR dan Pihak Konsumen dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor

3.2.1 Hak dan Kewajiban Bank

Hak bank sebagai kreditor penyedia dana bank berhak menerima sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen sebagai debitor dan menerima atas jaminan kredit yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara untuk menjamin debitur melakukan pembayaran utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, BPKB sebagai jaminan dari angsuran konsumen dalam Perjanjian

⁸ Ruri Hidayati, Legal Staff BPR Sukadana Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2018, Pukul 13.00 WIB.

⁹ Ruri Hidayati, Legal Staff BPR Sukadana Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2018, Pukul 13.00 WIB.

Kredit disimpan oleh bank untuk menjamin apabila konsumen mengingkari perjanjian yang telah disepakati.¹⁰

Kewajiban bank sebagai kreditor penyedia dana untuk pembelian sepeda motor memiliki kewajiban memberikan pembiayaan dan juga menyerahkan dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi agunan jika kredit telah lunas.

3.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen (nasabah)

Hak konsumen terdapat pada Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 yang menyatakan hak konsumen diantaranya konsumen berhak untuk dilayani dan diperlakukan secara benar serta jujur, hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara benar, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

Kewajiban konsumen selaku nasabah atau peminjam dana dari bank memiliki kewajiban untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, membayar angsuran secara tertib. Serta hak konsumen adalah memenuhi segala persyaratan administrasi dan konsumen harus menyerahkan jaminan kepada bank.

¹⁰ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.3 Tanggung Jawab Hukum yang Timbul antara Kedua Belah Pihak apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan atas Perjanjian Kredit yang Dilakukan.

3.3.1 Wanprestasi

Kendala yang sering terjadi dalam kredit adalah terjadinya wanprestasi dari pihak nasabah (debitur). Untuk mengatasi masalah tersebut pihak BPR Sukadana Surakarta sebagai kreditur berusaha untuk mengadakan konfirmasi dengan menghubungi debitur yang menunggak dengan memberi surat panggilan untuk datang ke kantor BPR Sukadana Surakarta dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tunggakan tersebut secara musyawarah.¹²

Akibat hukum bagi nasabah (debitur) yang wanprestasi harus lebih dulu ditetapkan apakah seorang debitur melakukan wanprestasi atau lalai. Untuk menentukan seseorang melakukan wanprestasi penilaian yang digunakan BPR Sukadana Surakarta adalah apabila seorang debitur tidak membayar satu bulan saja sudah dianggap wanprestasi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka pihak BPR Sukadana Surakarta melakukan cara-cara sebagai berikut :

a. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Tahapan ini pihak BPR mengirim surat kepada debitur yang wanprestasi untuk diselesaikan secara mufakat dan dengan penuh kekeluargaan. Dengan cara musyawarah dimungkinkan jika semua pihak yang berkepentingan hadir.

b. Dengan melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

c. Melalui Pengadilan

Apabila debitur menolak pelaksanaan lelang, berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Tanggungan ini dapat diadukan oleh kreditor sebagai pemegang hak tanggungan. BPKB menjadi jaminan yang dibebani hak tanggungan dapat menjadi pilihan eksekusi lelang yang disediakan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan mengingat kreditor tidak dapat

¹² Ruri Hidayati, Legal Staff BPR Sukadana Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 13 Agustus 2018, Pukul 09.00 WIB.

memanfaatkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan. Bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama.¹³

3.3.2 Perbuatan Melawan Hukum

Apabila dalam suatu perjanjian kredit bank dengan jaminan, musnahnya objek jaminan diakibatkan oleh suatu kesengajaan oleh perbuatan melawan hukum dari tertanggung (debitur pemberi jaminan) maka debitur wajib mengganti sepenuhnya objek jaminan tersebut kepada bank selaku kreditor. Apabila debitur tidak mau melaksanakan kewajibannya mengganti objek jaminan yang telah musnah karena perbuatan kesengajaan atau melawan hukum dari debitur tersebut maka bank selaku kreditor dapat melakukan tindakan hukum berupa gugatan ke pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta - harta debitur lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan yang telah musnah tersebut, dan perbuatan melawan hukum muncul apabila bank secara diam-diam menaikkan suku bunga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah saat perjanjian kredit berlangsung ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 butir G Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”¹⁴

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian antara pihak namk dan nasabah dalam kredit pembelian sepeda motor di Bank Perkreditan Rakyat Sukadana Surakarta melalui tahapan diantaranya : 1) Sebelum terjadinya perjanjian kredit pembelian sepeda motor, nasabah harus memenuhi kriteria untuk mengajukan kredit, nasabah harus memiliki jaminan kredit, memenuhi syarat administrasi dan memenuhi syarat sahnya perjanjian. 2) Saat terjadinya perjanjian kredit pembelian sepeda motor dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kredit dengan penandatanganan

¹³ Ruri Hidayati, Legal Staff BPR Sukadana Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 13 Agustus 2018, Pukul 09.00 WIB.

¹⁴ Pasal 18 butir G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

perjanjian kredit pembelian sepeda motor. 3) Setelah terjadinya perjanjian kredit pembelian sepeda motor timbulah hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati, yang dituangkan dalam akta perjanjian kredit.

Dalam hal Hak dan kewajiban bank sebagai kreditor penyedia dana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara juga mengatur mengenai hak bank sebagai penyedia dana mengenai asas umum hak kreditor terhadap konsumen yang mengatur kebendaan konsumen baik yang bergerak maupun tidak bergerak saat melakukan Perjanjian Kredit dengan bank maupun benda yang akan ada setelah perjanjian tersebut terjadi, hal tersebut akan menjadi jaminan bagi kreditor terhadap konsumen dalam melakukan perjanjian. Sedangkan hak dan kewajiban konsumen (nasabah) menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan hak konsumen diantaranya : 1) Konsumen berhak untuk dilayani dan diperlakukan secara benar serta jujur, 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan, 4) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara benar, 5) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, 6) Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, 7) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan nasabah berkewajiban mengembalikan dana yang dipinjam untuk membeli sepeda motor dengan cara mengangsur seperti yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara.

Tanggung jawab hukum muncul apabila debitur (nasabah) melakukan kelalaian atau kesalahan. Debitur dinyatakan wanprestasi apabila debitur telah melakukan kesalahan misalnya debitur tidak mampu membayar angsuran setelah beberapa kali ditagih oleh bank berturut-turut yang berarti debitur tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sedangkan apabila Debitur dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila debitur melakukan

kesalahan misalnya memusnahkan objek jaminan, memindahtangankan objek jaminan. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum itu muncul, maka nasabah berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada Kreditur/bank dan apabila bank menaikkan suku bunga tanpa pemberitahuan kepada nasabah terlebih dahulu.

4.2 Saran

Seharusnya pihak Bank Perkreditan Rakyat Sukadana Surakarta dalam memberikan pembiayaan kredit harus melakukan analisa mengenai kredibilitas calon nasabah sehingga dapat terhindar dari wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dari nasabah ketika berjalannya pelaksanaan kredit.

Bank Perkreditan Sukadana Surakarta perlu mengadakan pembinaan berkelanjutan dari pihak bank kepada nasabah dengan cara berkomunikasi antara semua bentuk permasalahan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi dengan tujuan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, sehingga mencegah terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Sofyan, Sri Soedewi, 1999, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sugiarto, 2001, *Teknik Sampling*, Jakarta: Gramedia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Internet/Website

- Wikipedia, "Sepeda Motor", https://id.wikipedia.org/wiki/sepeda_motor. Diakses pada 18 Mei 2018, pukul 15.39 WIB

Wawancara Pribadi

- Ruri Hidayati, Legal Staff BPR Sukadana Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2018, Pukul 10.00 WIB.
- Ruri Hidayati, Legal Staff BPR Sukadana Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2018, Pukul 13.00 WIB.
- Ruri Hidayati, Legal Staff BPR Sukadana Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 13 Agustus 2018, Pukul 09.00 WIB.